

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERDAGANGAN**



RENJA
(Rencana Kerja)
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perdagangan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Perdagangan maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah

Rantau , Juli 2023

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Tapin



H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M.IP
NIIP. 19670622 200801 1 008

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----|
| KATA PENGATA | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| BAB I | 1 |
| LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2. LANDASAN HUKUM | 2 |
| 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN | 5 |
| 1.3.1. Maksud | 6 |
| 1.3.2. Tujuan | 6 |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN | 7 |
| BAB II | 9 |
| EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU | 9 |
| 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD | 9 |
| 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN | 10 |
| 2.2.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Dinas Perdagangan Tahun 2021 | 10 |
| 2.2.2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Dan Tahun 2019 | 25 |
| 2.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah (Renstra) | 27 |
| 2.2.4. Perbandingan Dengan Kabupaten Lainnya Di Provinsi Kalsel | 28 |
| 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD | 30 |
| 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD | 31 |

| | |
|--|----|
| 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT | 32 |
| BAB III | 33 |
| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 33 |
| 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI..... | 33 |
| 3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 33 |
| 3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi | 35 |
| 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERDAGANGAN..... | 36 |
| 3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN..... | 37 |
| BAB IV..... | 57 |
| RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 57 |
| BAB V..... | 58 |
| PENUTUP | 58 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 2022
3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pedagangan 2022
4. Review terhadap rancangan RKPD 2024
5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

Dinas Perdagangan sebagai unit kerja Menyusun Petunjuk teknis, mengatur dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta menyediakan dukungan, memantau dan mengendalikan kegiatan perdagangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Perdagangan, maka disusunlah Renja PD Dinas Perdagangan tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra PD yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perdagangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Perangkat Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapakali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Keputusan Presiden Nomor 07 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden Nomor 07 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19);
 12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusumataan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menreti Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
25. Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tanggal 02 Desember 2016.
26. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang RKPD 2024 pada tanggal 03 Juli 2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD Dinas Perdagangan tahun 2024 Kabupaten Tapin.

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Dinas Perdagangan, sesuai dengan Renstra PD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan (RENSTRA) dengan perencanaan tahunan (RENJA) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
4. Menjadikan Renja 2024 sebagai acuan utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan tahun 2024; dan
5. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja PD Dinas Perdagangan dan Kabupaten Tapin tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap perangkat daerah serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun rencana dan prakiraan maju rencana tahun berikutnya, yang meliputi urusan, bidang urusan, program dan kegiatan, lokasi, indikator kinerja dan pagu indikatif Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perdagangan Kab. Tapin dalam menunjang IKU mempunyai 7 (tujuh) program utama urusan perdagangan sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Sedangkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 pada lampiran 1.

2.2. ANALISIS KINERJA DINAS PERDAGANGAN

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perdagangan. Keberhasilan kinerja dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.

Hasil keberhasilan kinerja dapat dilihat Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin pada lampiran 2:

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yakni :

2.2.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Dinas Perdagangan Tahun 2022

Pengukuran Capaian Kinerja adalah untuk mengetahui sejauhmana kinerja yang telah dicapai selama tahun 2022. Adapun Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 yaitu :

Tabel 2.2.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Utama Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target 2022 | Realisasi 2022 | Tingkat Capaian 2022 (%) |
|----|--------------------------------------|---|-------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan | 7% | 1,27% | 18,13% |

Dari tabel diatas bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan sebesar 1,27% dengan tingkat capaian 18,13% dari target tahun 2022 sebesar 7%, adapun cara pengukuran indikator Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2022 masih

mengacu pada data terakhir 2022 (PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) yang diakses pada tanggal 18 Januari 2023) .

PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 (tahun n) sebesar Rp. 587.239.280.000,- sedangkan pada tahun 2021 (tahun n-1) sebesar Rp. 579.879.380.000,- sehingga dapat diketahui Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Pertumbuhan volume Perdagangan diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Perdagangan.

$$G = \frac{\text{PDRB}_1 - \text{PDRB}_0}{\text{PDRB}_0} \times 100\%$$

G = Laju pertumbuhan volume perdagangan

PDRB1 = PDRB ADHK Sektor Perdagangan pada tahun n

PDRB0 = PDRB ADHK Sektor Perdagangan pada tahun n - 1

$$G = \frac{587.239.280.000 - 579.879.380.000}{579.879.380.000} \times 100\%$$

$$G = \frac{116.711.866.000}{579.879.380.000} \times 100\%$$

$$G = 1,27 \%$$

Adapun program-program yang laksanakan untuk memenuhi sasaran strategis dan kinerja utama sebagai berikut:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- c. Program Pengembangan Ekspor
- d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Tabel 2.2.1.2. Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Eselon III dan IV Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target 2022 | Realisasi 2022 | Tingkat Capaian 2022 (%) |
|---------------------|---|--|-------------|----------------|--------------------------|
| Esselton III | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Perdagangan Daerah | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | 12% | 8,93% | 74,42% |
| Esselton IV | | | | | |
| 1 | Terciptanya Tertib Usaha perdagangan | Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang | Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara komulatif | 15% | 0 | 0% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Untuk Tertib Usaha | Cakupan Pembinaan pelaku usaha | 70% | 30% | 43% |
| 4 | Mengembangkan Usaha Perdagangan | Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti | 3 Kali | 2 Kali | 66,67% |
| | | Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan | 100% | 100% | 100% |

- Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

Dari tabel diatas bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar Rp. 587.239.280.000,- pada tahun 2022 dan total PDRB kabupaten Tapin 2021 sebesar Rp 6.575.521.310.000,- yang mengacu pada data terakhir 2022 (PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) yang di akses pada tanggal 18 Januari 2023).

Kontribusi Sektor Perdagangan diukur dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Perdagangan.

Kontribusi Sektor Perdagangan = $\frac{\text{PDRB sektor perdagangan}}{\text{Total PDRB Kabupaten}} \times 100\%$

Kontribusi Sektor Perdagangan = $\frac{587.239.280.000}{6.575.521.310.000} \times 100\%$

Kontribusi Sektor Perdagangan = 8.93%

- **Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin**

Persentase Rekomendasi Izin yang diterbitkan pada tahun 2022 rekomendasi izin dari pemohon yang masuk dan diterbitkan baik itu Penerbitan Izin Usaha maupun Izin Rerklaime sebanyak 378 dari target yang ditentukan pada tahun 2022 sebesar 100% dari seluruh permohonan surat dengan capaian sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{378 \times 100\%}{378}$$

$$\text{Capaian} = 100 \%$$

- **Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara komulatif**

Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara komulatif pada tahun 2022 adalah 0%. Hal ini dikarenakan beberapa kendala dalam pencapaian target penerbitan resi gudang adalah :

- Lokasi Gudang SRG yang jauh dari wilayah pertanian.
- Minimnya kesadaran pemahaman asyarakat khususnya petani tentang Sistem Resi Gudang
- Budaya masyarakat yang terbiasa langsung menjual hasil pertaniannya setelah panen
- Masih maraknya tengkulak yang pro aktif turun ke wilayah pertanian yang menjanjikan dana tunai dengan membeli hasil panen tanpa proses yang berbelit-belit.

- Adanya fasilitas kredit dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang melayani kebutuhan kredit dengan proses yang mudah dan cepat.
- Adanya pelaku usaha lain yang melakukan kegiatan usaha yang sama layaknya Sistem Resi Gudang.

- **Cakupan Pembinaan pelaku usaha**

Kurang cermatnya dalam menyusun Rancangan Anggaran Kas sehingga pembinaan pelaku usaha tidak bisa dilaksanakan secara optimal, melalui Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan akan Melakukan identifikasi pelaku usaha yang dibina dan menjadwalkan pelaksanaan pembinaan pelaku usaha serta melakukan tindak lanjut yaitu berkoordinasi dengan para pelaku usaha berkaitan masalah waktu dan materi pembinaan.

Adapun Cakupan pembinaan pelaku usaha pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 70% dengan capaian 40% dengan capaian sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{30}{70} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 42,86 \%$$

- **Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti**

Pameran Dagang Nasional dan Pameran Dagang Lokal yang diikuti yaitu pameran Pameran Bandung Invest 2022, Pameran Produk Unggulan, Perdagangan Industri, Pariwisata dan Investasi (Indonesia TCTI 2022) dan Pameran MTQ Nasional Tahun 2022.

Dengan capaian sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100\%$$

- Percentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan**

Jenis produk yang dipamerkan pada tahun 2022 sebanyak 30 jenis dengan target yang telah ditentukan 30 jenis

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{30}{30} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100 \%$$

- Percentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan**

pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan pada tahun 2022 sebanyak 15 pelaku usaha dengan target yang telah ditentukan 15 pelaku usaha.

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{15}{15} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100 \%$$

Tabel 2.2.1.3 Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Pengembangan Saran Distribusi Perdagangan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target 2022 | Realisasi 2022 | Tingkat Capaian 2022 |
|--------------------|---|---|-------------|----------------|----------------------|
| Esselon III | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang | Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar | 79 | 76,70 | 97,09 |
| 2 | Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten | Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak | 85% | 80,56 | 94,78 |
| 3 | Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok | 1.5% | 0.54% | 160.67% |
| Esselon IV | | | | | |
| 1 | Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang layak | Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki | 6 Unit | 6 Unit | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target 2022 | Realisasi 2022 | Tingkat Capaian 2022 |
|----|---|---|----------------|----------------|----------------------|
| 2 | Terlaksananya Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar | Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas | 3768 Org/hari | 3752 Org/hari | 99,58% |
| | | Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas | 1476 Org/Bulan | 1476 Org/Bulan | 100% |
| 3 | Tersedianya Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat | Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat | 920 orang | 920 orang | 100% |
| 4 | Tersedianya informasi harga Barang Pokok dan Penting | Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi | Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran | 100% | 97,33% | 97,33% |

• **Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan**

Pasar

Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Adapun unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam pelayanan sebagai berikut:

| No | Unsur Pelayanan |
|----|---------------------------------|
| 1 | Prosedur Pelayanan |
| 2 | Kondisi bangunan pasar |
| 3 | Kejelasan Petugas Pelayanan |
| 4 | Kemampuan Petugas Pelayanan |
| 5 | Kebersihan lingkungan pasar |
| 6 | Kesopanan dan Keramahan Pelayan |
| 7 | Kewajaran Biaya Pelayanan |
| 8 | Kepastian Biaya Pelayanan |
| 9 | Kenyamanan Lingkungan |
| 10 | Keamanan Pelayanan |

Jawaban atas setiap unsur pertanyaan diatas dikategorikan ke dalam empat tingkatan kualitas pelayanan yaitu:

| No | Jawaban | Bobot |
|----|-------------|-------|
| 1 | Tidak baik | 1 |
| 2 | Kurang baik | 2 |
| 3 | Baik | 3 |
| 4 | Sangat Baik | 4 |

Untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Rata - Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)} \times 25$$

Adapun kategorisasi nilai persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut

| Nilai Persepsi | Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 1,00 - 2,5996 | 25,00 - 64,99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 2,60 - 3,064 | 65,50 - 76,60 | C | Kurang Baik |
| 3 | 3,0644 - 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 - 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat Baik |

Berdasarkan sample yang dijadikan responden dalam penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat pada tahun 2022 di Pasar Kabupaten Tapin ini berjumlah 110 orang, dengan hasil yang diperoleh dari survey menunjukkan kinerja unit pelayanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 76,70 berada dalam interval 76,61 – 88,30 dengan mutu kepuasan B yang dikategorikan Baik, perhitungan data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap pelayanan. Data olahan dari hasil survei dapat dilihat pada lampiran 3.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur-unsur yang mempunyai nilai terendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi harus tetap di pertahankan.

Survey kepuasan Masyarakat yang belum bisa mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat senilai 79. Adapun unsur yang perlu terus memperoleh perhatian untuk ditingkatkan,yaitu Kondisi Bangunan Pasar , Kebersihan Lingkungan Pasar dan Kewajaran Biaya Pelayanan.

- **Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak**

Indikator ini dihitung menurut jumlah aset gedung dan bangunan yang dikuasai dan terdapat pada SIMDA BMD Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dengan capaian target sebesar 85% pada tahun 2022, adapun realisasi pada indikator ini dihitung sebagai berikut :

**DATA BANGUNAN PASAR TRADISIONAL
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022**

| NO | NAMA PASAR | Lokasi | JUMLAH BANGUNAN | STATUS BANGUNAN | |
|----|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | LAYAK | TIDAK LAYAK |
| 1 | Pasar Binuang Baru | Kecamatan Binuang | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Pasar Hatungun | Kecamatan Hatungun | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Pasar Batung | Kecamatan Piani Desa Batung | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Pasar Margasari | Kecamatan Candi Laras Selatan | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Pasar Raya Rantau | Kecamatan Tapin Utara Rantau | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Pasar Tambarangan | Kecamatan Tapin Selatan | 1 | 1 | 0 |

| NO | NAMA PASAR | Lokasi | JUMLAH BANGUNAN | STATUS BANGUNAN | |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | LAYAK | TIDAK LAYAK |
| 7 | Pasar Bakarangan | Kecamatan Bakarangan | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Pasar Miawa | Kecamatan Piani Desa Miawa | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Pasar Keraton Rantau | Kecamatan Tapin Utara Jl. Keraton | 13 | 9 | 4 |
| 10 | Pasar Salam Babaris | Kecamatan Salam Babaris | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Pasar Tatakan | Kecamatan Tapin Selatan | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Pasar Bungur | Kecamatan Bungur | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Pasar Muara Muning | Kecamatan Candi Laras Selatan | 1 | 1 | 0 |
| Total | | | 36 | 29 | 7 |
| Persentase | | | | 80,56% | 19,44% |

Tingkat capaian Indikator Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak tahun 2021 berdasarkan rumus indikator sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{80,56\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 94,77\%$$

- **Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok**

Koefisien variasi tertinggi ditahun 2021 yaitu pada komoditas cabe rawit sebesar 0,54% dari target sebesar 1,5% dengan tingkat capaian sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{1,5 - (0,54-1,5)}{1,5} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 160,67\%$$

| NO | NAMA BAHAN POKOK | RATA-RATA | STANDAR DEVIASI | KOEFISIEN VARIASI |
|----|------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Beras Medium | 11.416,67 | 703,83 | 0,06 |
| 2 | Kacang kedelai | 13.055,56 | 362,32 | 0,03 |
| 3 | Cabe Merah | 70.180,56 | 37.935,54 | 0,54 |
| 4 | Cabe Rawit | 66.666,67 | 18.617,74 | 0,28 |
| 5 | Bawang Merah | 38.645,83 | 16.321,84 | 0,42 |
| 6 | Daging Ayam | 37.413,89 | 4.832,59 | 0,13 |
| 7 | Daging Sapi | 139.027,78 | 9.054,59 | 0,07 |

| NO | NAMA BAHAN POKOK | RATA-RATA | STANDAR DEVIASI | KOEFISIEN VARIASI |
|---|------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 8 | Telur | 27.722,22 | 4.683,92 | 0,17 |
| 9 | Ikan Kembung | 36.666,67 | 3.132,86 | 0,09 |
| 10 | Minyak Goreng | 21.979,67 | 4.641,18 | 0,21 |
| 11 | Tepung Terigu | 11.666,67 | 1.253,14 | 0,11 |
| 12 | Gula Pasir | 13.774,31 | 762,45 | 0,06 |
| Koefisien variasi tertinggi tahun 2022 yaitu komoditas cabe rawit sebesar | | | | 0,54 |

- **Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki**

Pada tahun 2022 Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Perdagangan. Untuk target tahun 2022 sebesar 6 buah sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki sampai dengan akhir tahun 2022 dapat dapat terlaksana 6 buah yaitu:

1. Pembuatan Atap Los Pasar Tambarangan
2. Pembangunan Pasar Miawa
3. Rehab Bangunan, Halaman dan Akses Jalan Masuk Pasar
4. Rehab Teras Pasar Binuang Blok B
5. Pembangunan Los Pasar Linuh
6. Pembangunan Pos Jaga Keamanan Pasar dan Portal Parkir.

Sehingga capaian tahun 2022 adalah dapat dihitung seperti yang dibawah ini.

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100 \%$$

- **Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas**

Jumlah petugas keamanan yang telah diturunkan selama tahun 2022 adalah 3752 Orang/hari dengan target 3768 kali dari Orang/hari. Sehingga capaian pada tahun 2022 adalah

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{3752}{3768} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 99,58 \%$$

- Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas**

Jumlah petugas keamanan yang telah diturunkan selama tahun 2022 adalah 1416 Orang/bulan dengan target 1416 dari Orang/hari. Sehingga tingkat capaian pada tahun 2022 adalah

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{1416}{1416} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100 \%$$

| No | Petugas Kebersihan | Jumlah Petugas Kebersihan Yang Bertugas | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----------|--------|---------|--------|
| | | Target | Realisasi | | | |
| | | | Tri I | Tri II | Tri III | Tri IV |
| 1 | Mandor Pasar Keraton | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | Mandor Pasar Binuang | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 3 | Mandor Pasar Raya | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 4 | Drainase Pasar Binuang | 96 | 8 | 48 | 64 | 96 |
| 5 | Drainase Pasar Raya | 120 | 10 | 60 | 80 | 120 |
| 6 | Drainase Pasar Keraton | 240 | 45 | 165 | 210 | 240 |
| 7 | Kebersihan Pasar Batung | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 8 | Kebersihan Pasar binuang | 108 | 27 | 54 | 81 | 108 |
| 9 | Kebersihan Pasar keraton | 456 | 114 | 228 | 342 | 456 |
| 10 | Kebersihan Pasar margasari | 24 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 11 | Kebersihan Pasar miawa | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 12 | Kebersihan Pasar muara muning | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 13 | Kebersihan Pasar Raya | 288 | 72 | 144 | 216 | 288 |
| 14 | Kebersihan Pasar tambarangan | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| | Total | 1.416 | 303 | 753 | 1074 | 1416 |

- Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/ Warung yang akurat**

Terpenuhinya Permohonan Pembuatan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios/ Warung selama tahun 2022 dengan jumlah 920 surat dari target yang ditentukan sebesar 920 surat yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini dengan tingkat capaian sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{920}{920} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100\%$$

| NO | NAMA PASAR | JUMLAH TOKO | KEADAAN OPERASIONAL TOKO | |
|-------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | | Aktif | Tidak Aktif |
| 1 | Pasar Keraton | 434 | 360 | 74 |
| 2 | Pasar Raya Rantau | 454 | 399 | 55 |
| 3 | Pasar Binuang | 196 | 145 | 51 |
| 4 | Pasar Tambarangan | 30 | 16 | 14 |
| TOTAL | | 1114 | 920 | 194 |

- Percentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Percentase Ketersediaan informasi Barang Pokok dan Penting merupakan tersedianya data harga sembako dan barang penting lainnya di Kab. Tapin selama 1 (satu) tahun, dimana pendataan yang ditargetkan sebanyak 48 kali, dalam satu bulannya dilaksanakan sebanyak 4 kali.

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{48}{48} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100\%$$

- Percentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran**

Berdasarkan rekapitulasi pupuk bersubsidi bulan januari sampai dengan Desember di kabupaten tapin tahun 2022 Alokasi Pupuk bersubsidi sebesar 8.082,52 dengan realisasi 7.866,60 sebesar 97,33%, adapun jenis pupuk yang disalurkan yaitu UREA, SP-36, ZA, NPK, Organik Granul, Organik Cair. Percentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran dari target sebesar 98% dengan tingkat capaian dan alokasi perkecamatan yaitu sebagai berikut :

Tingkat Capaian = $\frac{97,33}{100} \times 100\%$

Tingkat Capaian = 97,33 %

| No | Kecamatan | Jumlah Total | Jumlah Total | Sisa | Pesentase |
|--------|---------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 1 | Bakarangan | 312,50 | 311,76 | 0,74 | 99,76% |
| 2 | Binuang | 459,00 | 456,60 | 2,40 | 99,48% |
| 3 | Bungur | 466,50 | 405,80 | 60,70 | 86,99% |
| 4 | Candi Laras Selatan | 911,00 | 907,80 | 3,20 | 99,65% |
| 5 | Candi Laras Utara | 1.608,00 | 1.607,55 | 0,45 | 99,97% |
| 6 | Hatungun | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 100% |
| 7 | Lokpaikat | 270,96 | 270,96 | 0,00 | 100% |
| 8 | Piani | 374,19 | 374,19 | 0,00 | 100% |
| 9 | Salam Babaris | 440,10 | 438,20 | 1,90 | 99,57% |
| 10 | Tapin Selatan | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 100% |
| 11 | Tapin Tengah | 1.135,50 | 968,49 | 167,01 | 85,29% |
| 12 | Tapin Utara | 763,50 | 763,50 | 0,00 | 100% |
| Jumlah | | 8.082,25 | 7.866,60 | 215,65 | 97,33% |

Tabel 2.2.1.4. Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Kemetriologi dan Pengawasan Perdagangan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target 2022 | Realisasi 2022 | Tingkat Capaian 2022 |
|--------------------|--|---|------------------|------------------|----------------------|
| Esselon III | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal | Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan | 60% | 55,36% | 92,26% |
| | | Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT | 100% | 100% | 100% |
| Esselon IV | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku | Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera | 500 Unit | 706 Unit | 141,20% |
| 2 | Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina | Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina | 200 Pelaku Usaha | 200 Pelaku Usaha | 100% |

- **Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan**

Pelaksanaan Tera/tera ulang dikabupaten belum mandiri sehingga harus difasilitasi. sehingga perlunya Mengusulkan penyesuaian SOTK dan melakukan perubahan anggaran kegiatan yang dapat dilakukan pada saat pandemi dengan mengkoordinasikan dengan kasi kemetrologian mengenai penyusunan rencana kegiatan yg akan dilakukan terkait program dan kegiatan yang masih belum dilaksanakan. Selama tahun 2022 Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang sebanyak 780 atau 55,36% dari target 60% berdasarkan potensi UTTP di Kabupaten Tapin sebesar 1409 sehingga capaian sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{55,36\%}{60\%} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 92,26 \%$$

- **Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT**

Pelaksanaan pengawasan terhadap UTTP dan BDKT dapat terlaksana setelah tahun sebelumnya terkendala dengan pandemi covid-19. Selama tahun 2022 telah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha bidang metrologi sehingga capaian sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100 \%$$

- **Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera**

Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP dapat terlaksana setelah tahun sebelumnya terkendala dengan pandemi covid-19, untuk Unit Metrologi Legal di Kabupaten Tapin sendiri belum bisa Melayani secara mandiri dikarenakan belum selesai nya SOTK untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang. Selama tahun 2022 Jumlah alat Ukur, Takar,

Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/terulang sebanyak 706 Unit dari target 500 Unit sehingga capaian:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{706}{500} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} = 141,20 \%$$

- **Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina**

Rencananya Penyuluhan kmetrologian dilakukan secara langsung yaitu penyuluhan kmetrologian melalui tatap muka dengan jumlah peserta 200 orang dari target 200 orang dengan capaian sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{200}{200} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} = 100 \%$$

2.2.2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021 Dan Tahun 2020

Analisis realisasi dan capaian kinerja Dinas Perdagangan pada LKIP Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1. Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Perbandingan Realisasi Kinerja | | | | | |
|----|--|---|--------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan | Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan | 10% | 6,38 | 6% | -0,23% | 7% | 1,27% |
| 2 | Meningkatnya Perdagangan Daerah | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | 10% | 9,0% | 11% | 9,12% | 12% | 8,93% |
| 3 | Terciptanya Tertib Usaha perdagangan | Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Perbandingan Realisasi Kinerja | | | | | |
|----|---|--|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 4 | Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang | Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara komulatif | - | - | 15% | 0 | 15% | 0 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Untuk Tertib Usaha | Cakupan Pembinaan pelaku usaha | - | - | 60% | 50% | 70% | 30% |
| 6 | Mengembangkan Usaha Perdagangan | Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti | 3 Kali | 1 Kali | 3 Kali | 2 Kali | 3 Kali | 3 Kali |
| | | Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang | Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar | 76 IKM | 72,09 IKM | 78 IKM | 76,66 IKM | 79 IKM | 76,70 IKM |
| 8 | Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten | Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak | - | - | 81% | 77,78% | 85% | 80,56% |
| 9 | Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok | - | - | 1,5% | 0,87% | 1,5% | 0,54% |
| 10 | Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang layak | Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki | - | - | 3 Buah | 2 Buah | 6 Buah | 6 Buah |
| 11 | Terlaksananya Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar | Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas | - | - | 5471 orang/ hari | 5459 orang/ hari | 3768 orang/ hari | 3752 orang/ hari |
| | | Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas | - | - | 1416 Orang/ bulan | 1416 Orang/ bulan | 1476 Orang/ bulan | 1476 Orang/ bulan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Perbandingan Realisasi Kinerja | | | | | |
|----|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 12 | Tersedianya Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat | Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat | 1000 | 735 | 1000 | 920 | 920 | 920 |
| 13 | Tersedianya informasi harga Barang Pokok dan Penting | Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi | Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran | 98% | 97,78% | 98% | 78,94% | 100% | 97 ,33% |
| 15 | Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal | Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan | 100% | 48% | 50% | 28% | 60% | 55,36% |
| | | Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan | Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera | 150 Buah | 72 unit | 100 Unit | 28 Unit | 500 Unit | 606 Unit |
| 17 | Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina | Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina | 100 Pelaku Usaha | 100 Pelaku Usaha | 300 Pelaku Usaha | 300 Pelaku Usaha | 200 Pelaku Usaha | 200 Pelaku Usaha |

2.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Analisis capaian kinerja Dinas Perdagangan pada LKIP Tahun 2022 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis

membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target 2023 | Realisasi 2022 | Tingkat Capaian % |
|----|---|---|-------------|----------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan | Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan | 8% | 1,27% | 15,88% |
| 2 | Meningkatnya Perdagangan Daerah | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | 12,5% | 8,93% | 71,44% |
| 3 | Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang | Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar | 79 IKM | 76,70 IKM | 97,09% |
| 4 | Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten | Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak | 89% | 80,56% | 90,52% |
| 5 | Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok | 1,40% | 0,54% | 141,63% |
| 6 | Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal | Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan | 70% | 55,36% | 79,08% |
| | | Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT | 100% | 100% | 100% |

2.2.4. Perbandingan Dengan Kabupaten Lainnya Di Provinsi Kalsel

Pada perbandingan ini masih menunjukkan data Tahun 2022 masih menggunakan nilai sementara, karena nilai tersebut BPS belum mengeluarkan Nilai PDRB tahun 2022, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:

Pada tahun 2017 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin 6,49% menempati urutan ke-12 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2018 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin 7,84% menempati urutan ke-5 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2019 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin 6,38% menempati urutan ke-10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2020 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin -0,23% menempati urutan ke-1 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan terendah.

Pada tahun 2021 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin 1,27% menempati urutan ke-10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Berikut ini adalah tabel Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan di Provinsi Kalimantan Selatan menurut Lapangan Usaha berdasarkan Atas Dasar Konstan (ADHK) :

Tabel 2.2.4.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan

| No. | Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | | | | | | |
|-----|---------------------|--|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
| 1 | Tanah Laut | 7,85% | 7,95% | 7,21% | 6,59% | -2,93% | 3,20% | 3,20% |
| 2 | Kotabaru | 7,34% | 7,77% | 7,45% | 7,10% | -1,41% | 1,92% | 1,92% |
| 3 | Banjar | 7,84% | 6,75% | 6,91% | 6,39% | -3,93% | 1,24% | 1,24% |
| 4 | Balangan | 7,71% | 8,12% | 3,70% | 4,68% | -0,93% | 3,57% | 3,57% |
| 5 | Banjarbaru | 8,18% | 8,03% | 7,96% | 7,75% | -3,09% | 3,91% | 3,91% |
| 6 | Banjarmasin | 7,00% | 6,87% | 6,83% | 6,89% | -5,15% | 4,60% | 4,60% |
| 7 | Barito Kuala | 7,92% | 7,77% | 7,68% | 7,22% | -3,35% | 2,85% | 2,85% |
| 8 | Hulu Sungai Selatan | 4,60% | 5,28% | 4,84% | 4,96% | -1,91% | 4,40% | 4,40% |
| 9 | Hulu Sungai Tengah | 7,91% | 6,89% | 7,74% | 8,60% | -3,36% | 4,36% | 4,36% |
| 10 | Hulu Sungai Utara | 7,97% | 8,24% | 8,13% | 7,51% | -4,65% | 4,62% | 4,62% |
| 11 | Tabalong | 9,03% | 11,33% | 9,47% | 9,48% | -2,30% | 1,23% | 1,23% |
| 12 | Tanah Bumbu | 10,22% | 9,20% | 8,41% | 8,19% | -4,53% | 0,36% | 0,36% |
| 13 | Tapin | 8,78% | 6,49% | 7,84% | 6,38% | -0,23% | 1,27% | 1,27% |

* Catatan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2022 merupakan data sementara yang merupakan update terbaru dari BPS masing-masing Kabupaten/Kota

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN DINAS PERDAGANGAN

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Perdagangan sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya pengembangan usaha pada sektor Perdagangan;
- 2) Masih beredarnya barang atau produk kadaluarsa yang tidak layak jual di Kabupaten Tapin;
- 3) Kurang dikenalnya produk kerajinan Kabupaten Tapin;
- 4) Pengembangan potensi sumber alam dengan tingkat pengelolaan dan pemanfaatan saat ini perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan perdagangan di daerah
- 5) Perlu dibangun UPTD Meterologi pengujian alat ukur takar timbang dan penyediaan aparatur penera.
- 6) Peningkatan informasi tentang potensi komoditi yang berpeluang ekspor khususnya kepada dunia usaha dan investor baik dalam dan luar negeri sehingga tertarik untuk pengembangannya di Kabupaten Tapin.
- 7) Perlunya dirancang perda di bidang Perdagangan yang menyangkut perlindungan konsumen dan penerapan SNI wajib uji;
- 8) Mempercepat sasaran pembangunan atau revitalisasi sarana dan pembinaan di bidang perdagangan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan;

- 9) Perlunya data dan informasi kepada pelaku usaha tentang wajib daftar perusahaan dan syarat-syaratnya.
- 10) Pelayanan Tera/Tera Ulang belum maksimal karena untuk Kabupaten Tapin dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang masih difasilitasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III untuk Wilayah Kalimantan, untuk Unit Metrologi Legal di Kabupaten Tapin sendiri belum bisa Melayani secara mandiri dikarenakan belum selesai nya SOTK untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 11) Kurangnya kesadaran dari PKL dalam berjualan sesuai dengan penempatannya sehingga kurang tertata dengan rapi dilingkungan pasar Keraton khususnya dilokasi berjualan pasar pagi.
- 12) Belum adanya Sistem dan Jaringan Informasi Harga Sembako Perdagangan di Kabupaten Tapin .
- 13) Perbaikan sarana dan prasarana perdagangan terutama bagi pasar tradisional memerlukan biaya yang cukup besar sedangkan kemampuan APBD Kabupaten Tapin tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan dan revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tapin.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perdagangan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappelitbang berdasarkan RKPD.

Review terhadap RKPD dapat dijabarkan dalam Tabel 2.3. Review Terhadap pada lampiran 4.

2.5. PENALARAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Tabel 2.4. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,

8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengekspor batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;

3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon, dan pasir kuarsa;
2. Penyediaan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan Pangan
7. Ketahanan Energi

8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan public

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERDAGANGAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Dinas Perdagangan selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2023 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan.

**Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan
Dinas Perdagangan kab. Tapin**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun | |
|-----------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | 2024 | Kondisi Akhir Periode |
| | Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah | | Pertumbuhan kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB | 0,5 | 0,5 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun | |
|----|--|--|---|---|-----------------------------|
| | | | | 2024 | Kondisi Akhir Periode |
| | | Meningkatnya Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,22 | 6,70 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 86 | 97 |
| | | Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) | 29 | 30 |

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Kab. Tapin Tahun 2024 adalah Sebagai berikut :

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--|--|---|---|--------|--------|------------|
| Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah | Meningkatnya Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Pertumbuhan kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB | Pertumbuhan kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB | % | 0,35 | |
| Terciptanya Tertib Usaha perdagangan | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Percentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memiliki izin Usaha | Percentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memiliki izin Usaha | % | 6,22 | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Perdagangan | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Percentase rekomendasi izin usaha yang diberikan | Percentase rekomendasi izin usaha yang diberikan | % | 100 | 38.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--|--|--|-------------------|--------|-------------|------|
| Terlaksananya Rekomendasi Perizinan Usaha | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 400 | 38.000.000 | |
| Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha Perdagangan Berkembangnya Usaha Perdagangan | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPORT | Rata-rata Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha yang dibina | % | 20 | 138.000.000 | |
| | | Persentase Pelaku Usaha lokal yang memiliki pasar di luar daerah | % | 15 | | |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|---|---|--|-------------------|--------|-------------|------|
| Meningkatnya Promosi Produk Lokal di tingkat Regional dan Nasional | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pembinaaan pelaku usaha potensial | % | 100 | 138.000.000 | |
| Terlaksananya Pembinaan kepada Pelaku Usaha terhadap Fasilitasi terhadap Pelaku Usaha | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina | Pelaku Usaha | 25 | 30.400.000 | |
| | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | Pelaku Usaha | 10 | 60.600.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--|---------|---|--|--------------|--------|-------------|
| dalam Mempromosikan Produk Usahanya | | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | Pelaku Usaha | 15 | 47.000.000 |
| Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang NEGERI | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Pertumbuhan Jumlah Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif | % | 15,56 | 252.532.231 |
| Meningkatnya Promosi Penggunaan Produk Dalam negeri di Daerah | | | Pertumbuhan Jenis Produk Lokal yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Daerah | % | 20 | |
| Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Pengelolaan Sistem Resi Gudang | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Cakupan Wilayah Pembinaan Sistem Resi Gudang | % | 85 | 252.532.231 |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--------|--|--|--|--------|--------|---------------|
| | Tersedianya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Percentase pelaku usaha produk lokal yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Percentase pelaku usaha produk lokal yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | % | 70 | |
| | Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | UMKM | 100 | 252.532.231 |
| | Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar | IKM | 78 | 4.050.000.000 |
| | Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten | | Percentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak | % | 85 | |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--------|--|---|--|--------|---------------|---------------|
| | Meningkatnya Penerimaan Retribusi pasar | | Persentase penerimaan retribusi pasar | % | 100 | |
| | Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang layak | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dibangun/diperbaiki | Persentase Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki | % | 100 | 4.000.000.000 |
| | Terlaksananya Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar | Jumlah Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Pedagang di Wilayah Pasar | Orang/Kali | 1800 | | |
| | | Jumlah Pelaksanaan Kebersihan di Wilayah Pasar | Orang/Kali | 1100 | | |
| | Terlaksananya Perbaikan, Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 1 | 2.200.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--------|--|---|--|---------|--------|---------------|
| | Terlaksananya Fasilitasi terhadap Sarana Distribusi Perdagangan | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 15 | 1.800.000.000 |
| | Tersedianya Data Penyewa Toko/Kios/Los/ Warung yang akurat | Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase Data Penyewa Toko/Kios/Los/ Warung | % | 100 | 50.000.000 |
| | Terlaksananya Pembinaan kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Dokumen | 4 | 50.000.000 |
| | Terjaganya Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok | % | 1 | 50.000.000 |
| | Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat | % | 100 | 14.999.952 |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--|--|---|--------------------------|--------|------------|------|
| | | | Jumlah dan Tepat Sasaran | | | |
| Terlaksananya Laporan Harga Barang Pokok dan Barang Penting | Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Laporan | 4 | 14.999.952 | |
| Tersedianya informasi harga Barang Pokok dan Penting | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Percentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | % | 100 | 35.000.048 | |
| Terlaksananya Pengendalian terhadap Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di | Laporan | 48 | 20.027.248 | |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--------|---------|---|---|--|--------|-------------|
| | | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Laporan | 4 | 14.972.800 |
| | | Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Percentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan | % | 70 |
| | | | | Percentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP yang di awasi | % | 100 |
| | | | | | | 139.068.400 |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--------|---|--|---|--------|--------|-------------|
| | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Percentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera | % | 100 | 139.068.400 |
| | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terkait BDKT makanan dan minuman | Jumlah BDKT makanan dan minuman yang diawasi | Unit | 400 | | |
| | | Jumlah kegiatan/ konten edukasi UTTP dan BDKT serta Satuan Ukuran yang dilaksanakan/ diposting | Postingan | 20 | | |
| | | Jumlah UTTP yang diawasi | Sampel | 900 | | |
| | | Persentase Tindak Lanjut Hasil pengawasan UTTP | % | 100 | | |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--|---------|---|--|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Terlaksananya Kemetrologian | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Alat Ukur, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | Unit Orang | 900 300 | 120.000.000 19.068.400 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 86,00 | |
| Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | | | Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja) Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja) | Skor | 29,00 27,00 16,00 | |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|---|--|--|--|--------|---------------|------|
| | | | Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal) | Skor | 22,00 | |
| Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat | % | 100 | 4.162.812.297 | |
| SDM yang berkualitas | | Percentase efisiensi penggunaan anggaran | % | 100 | | |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Percentase ASN dengan capaian kinerja >90% | % | 100 | | |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--------|---------|---|--|---------|--------|-----------|
| | | | Percentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang | % | 100 | |
| | | | Percentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | % | 100 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 10 | 8.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--------|---|---|---|-------------|--------|---------------|
| | Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan | % | 100 | 3.052.566.997 |
| | | | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar | % | 100 | |
| | | | persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti | % | 100 | |
| | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 360 | 3.042.666.997 |
| | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 3.900.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--------|---|---|--|---------|--------|-------------|
| | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 3 | 6.000.000 |
| | Meningkatnya Pelayanan Sekretariat | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat | IKM | 81 | 503.260.700 |
| | Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas | | Percentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN | % | 100 | |
| | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 17.664.700 |
| | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 67.690.200 |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--------|---|--|---|---------|--------|-------------|
| | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 13 | 1.000.000 |
| | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 91.052.200 |
| | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 21.724.800 |
| | Tersedianya Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Fasilitasi Kunjungan Tamu | Paket | 12 | 3.128.800 |
| | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 |
| | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 350 | 300.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|---|--|--|-------------------|--------|--------|-------------|
| Meningkatnya kualitas barang milik daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Percentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | 85.000.000 |
| Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 6 | 6 | 70.000.000 |
| Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 | 4 | 15.000.000 |
| Meningkatnya Pelayanan Sekretariat | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat | IKM | 81 | 81 | 359.156.600 |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 136.456.600 |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--------|---|--|--|---------|--------|-------------|
| | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 222.700.000 |
| | Meningkatnya kualitas barang milik daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | % | 100 | 154.828.000 |
| | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 20 | 88.978.000 |
| | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 20 | 19.850.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | target | Pagu |
|--------------|--|--|--|--------|--------|----------------------|
| | Terpeliharanya Aset Tak Berwujud | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | 3 | 6.000.000 |
| | Terpeliharanya/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 40.000.000 |
| TOTAL | | | | | | 8.830.412.928 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Rencana Program dan Kegiatan dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 dalam Tabel 2.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 5.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perdagangan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Perdagangan maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

BUPATI TAPIN,



Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Kabupaten Tapin

| KODE | Nama SKPD : Dinas Perdagangan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Satuan | Target Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran SKPD tahun 2023 | | Target Program/ Kegiatan (Renstra 2024) | | Perkirain Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD | | Catatan |
|------|-------------------------------|--|--|--------------|--|---|---|----------------------|---|-------------------------------|--|---------------------|---------|
| | | | | | Target Capaian Program (Renstra 2024-2026) | Realisasi Capaian Program (Renstra 2024-2026) | Target Renja 2023 | Realisasi Renja 2023 | Tingkat Realisasi (%) | Target Capaian (Renstra 2024) | Realisasi Capaian (Renstra 2024) | Tingkat Capaian (%) | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(8/7) | 10 | 11=(10) | 12=(11/5) | 13 |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memiliki izin Usaha | % | 65 | 55,36 | 50 | 68,21 | 136,42 | 55 | 55 | 84,62 | |
| | | | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan izin Usaha Toko Swalayan | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 450 | 378 | 350 | 25 | 7,14 | 400 | 400 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | % | 20 | 13 | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 88,89 |
| | | | Rata-rata Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha yang dibina | % | 20 | 15 | 0,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
| | | | Persentase Pelaku Usaha lokal yang memiliki pasar di luar daerah | % | | | | | | | | | |
| | | | Cakupan Pembinaan pelaku usaha potensial | % | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Persentase Pameran produk lokal yang dilakukan | % | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Persentase Jenis Produk Lokal potensial yang ditampilkan | % | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Persentase pelaku usaha potensial yang dipromosikan | % | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha Produk Eksport Unggulan yang Dibina | Pelaku Usaha | 30 | 5 | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 83,33 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional | Pelaku Usaha | 15 | 5 | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66,67 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | Pelaku Usaha | 20 | 10 | 0,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Satuan | Target Capaian Program (Ranstra 2024-2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran SKPD tahun 2023 | | Target Program/ Kegiatan (Ranja 2024) | Perkiraaan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD | | Catatan |
|------|--|---|------------|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | | | | Target Ranja 2023 | Realisasi Renja 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(8/7) | 10 | 11=(10) | 12=(11/5) |
| 1 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Pertumbuhan Jumlah Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif Pertumbuhan Jenis Produk Lokal yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Daerah | % | 18,03 | 0,00 | 15 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 15,56 | 86,30 |
| | | Cakupan Wilayah Pembinaan Sistem Resi Gudang | % | 85 | | | 85 | 0,00 | 0,00 | 85 | 85 |
| | | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | % | 70 | | | 70 | 0,00 | 0,00 | 70 | 70 |
| | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | % | 70 | | | 70 | 0,00 | 0,00 | 70 | 70 |
| | | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | UMKM | 100 | 115 | 75 | | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar | IKM | 80 | 76,7 | 86 | 76,66 | 89,14 | 78 | 78 | 97,5 |
| | | Percentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak | % | 87 | 80,56 | 90 | 77,78 | 86,42 | 85 | 85 | 97,70 |
| | | Percentase penerimaan retribusi pasar | % | 100 | 94,51 | 100 | 7,36 | 7,36 | 100 | 100 | 100 |
| | | Percentase Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki | % | 100 | | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| | | Jumlah Pelaksanaan Penataan dan Peneritian Pedagang di Wilayah Pasar | Orang/Kali | 2200 | | 1665 | 127 | 7,63 | 1800 | 1800 | 81,82 |
| | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Pasar | Orang/Kali | 1200 | | 1090 | 186 | 17,06 | 1100 | 1100 | 91,67 |
| | | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 2 | 6 | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 50 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 17 | 13 | 14 | 0 | 0,00 | 15 | 15 | 88,24 |
| | | Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah | % | 100 | 100 | 100 | 92 | 92,00 | 100 | 100 | 100 |
| | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Dokumen | 6 | 4 | 3 | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 66,67 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Satuan | Target Capaian Program (Ranstra 2024-2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran SKPD tahun 2023 | | Target Program/ Kegiatan (Renja 2024) | Perkiraaan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD | | Catatan |
|------|--|---|------------|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| | | | | | | Target Renja 2023 | Realisasi Renja 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(8/7) | 10 | 11=(10) | 12=(11/5) |
| 1 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok | % | 1 | 0,54 | 1 | 0,17 | 183,00 | 1 | 1 | 100 |
| | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran | % | 100 | 97,33 | 100 | 25 | 25,00 | 100 | 100 | 100 |
| | Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Laporan | 4 | 4 | 4 | 1 | 25,00 | 4 | 4 | 100 |
| | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Percentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | % | 100 | 100 | 21 | 21 | 21,00 | 100 | 100 | 100 |
| | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Laporan | 48 | 48 | 12 | 25,00 | 48 | 48 | 48 | 100 |
| | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 4 | 4 | 1 | 25,00 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONTRAK | Percentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan | % | 75 | 55,36 | 60 | 4,75 | 7,92 | 70 | 70 | 93,33 |
| | | Percentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP yang di awasi | % | 100 | 100 | 100 | 66,6 | 66,60 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Percentase alat ukur, Tera, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera | % | 100 | 141,2 | 100 | 8,38 | 8,38 | 100 | 100 | 100 |
| | | Jumlah BDKT makanan dan minuman yang diawasi | Unit | 500 | 323 | 350 | 455 | 130,00 | 400 | 400 | 80 |
| | | Jumlah kegiatan/ konten edukasi UTTP dan BDKT serta Satuan Ukuran yang dilaksanakan/ diposting | Posttingan | 30 | | 15 | 0,00 | | 20 | 20 | 66,67 |
| | Jumlah UTTP yang diawas | Sampel | 900 | | 800 | 25 | 3,13 | 900 | 900 | 900 | 100 |
| | Percentase Tindak Lanjut Hasil pengawasan UTTP | % | 100 | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Satuan | Target Capaian Program (Renstra 2024-2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran SKPD tahun 2023 | | Target Program/ Kegiatan (Renja 2024) | Perkiraaan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD | | Catatan |
|------|--|--|-------------|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | | | | Target Renja 2023 | Realisasi Renja 2023 | | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(8/7) | 10 | 11=(10) | 12=(11/5) |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Unit | 980 | 706 | 800 | 67 | 8,38 | 900 | 900 | 91,84 |
| | Pengawasai/Penyaluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal Yang Dibina | Orang | 300 | 200 | 300 | | 0,00 | 300 | 300 | 100 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% | % | 100 | 100 | 27,89 | 27,89 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Percentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diskomodir dalam dokumen perencanaan Percentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 | 10 | 10 | 8 | 80,00 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Percentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Percentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | persentase hasil temuan pemeriksaan yang dihindakan/jaluti | % | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 360 | 360 | 180 | 50,00 | 360 | 360 | 360 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Satuan | Target Capaian Program (Renstra 2024-2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran SKPD tahun 2023 | | Target Program/ Kegiatan (Renstra 2024) | Perkiraaan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD | |
|------|--|--|--|--|---|---|----------------------|---|---|---------------------|
| | | | | | | Target Renja 2023 | Realisasi Renja 2023 | | Realisasi Capaian (%) | Tingkat Capaian (%) |
| | | | | | | Realisasi Capaian (%) | Tingkat Capaian (%) | | Realisasi Capaian (%) | Tingkat Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(8/7) |
| | | | Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN | IKM | 83 | | 80 | 76 | 95,00 | 81 |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 2 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 5 | 5 | 2 | 40,00 | 5 |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 13 | 13 | 0 | 0,00 | 13 | 13 |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 6 | 50,00 | 12 | 12 |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 2 |
| | | | Jumlah Paket Fasilitasi Kunjungan Tamu | Paket | 12 | 12 | 6 | 50,00 | 12 | 12 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 2 |
| | | | Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 350 | 350 | 3 | 0,86 | 350 | 350 |
| | | | Penyediaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | 90,99 | 90,99 | 100 | 100 |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 8 | 30 | 6 | 100,00 | 8 | 8 |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 5 | 17 | 4 | 100,00 | 5 | 5 |
| | | | Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat | IKM | 83 | | 80 | 76 | 95,00 | 81 |
| | | | Jumlah Laporan Penyeleksi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 6 | 50,00 | 12 | 12 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Satuan | Target Capaian Program (Renstra 2024-2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran SKPD tahun 2023 | Target Program/ Kegiatan (Renja 2024) | Perkiraaan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Catatan | |
|------|--|--|---------|--|---|---|---------------------------------------|---|-----|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 | 10 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 12 | 6 | 50,00 | 12 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Percentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | % | 100 | 90 | 100 | 90,99 | 90,99 | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara | Unit | 20 | 20 | 20 | 15 | 75,00 | 20 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 20 | 20 | 20 | 12 | 60,00 | 20 |
| | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 3 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 3 | 3 | 2 | 66,67 | 3 |

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Tapin

PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (PEDAGANG) TERHADAP PELAYANAN PETUGAS PER RESPONDEN

SKPD : DINAS PERDAGANGAN
TAHUN : 2022

| No Responden | Unsur yang dinilai | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 |
| 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 54 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 56 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 60 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 63 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 64 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 70 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 72 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 74 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 75 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 78 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 90 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 96 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 101 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 102 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 103 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**NILAI BOBOT JAWABAN RESPONDEN, NILAI PER UNSUR, NILAI RATA-RATA, NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
DAN NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (PEDAGANG) PADA TAHUN 2022**

| NO | UNSUR PELAYANAN | ALTERNATIF JAWABAN DAN BOBOT NILAI | | | | | | JUMLAH NILAI | | | NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR |
|----|---------------------------------|------------------------------------|----|----|----|-----|-----|--------------|-----|----------------|---|
| | | A | NU | B | NU | C | NU | D | NU | NILAI UNSUR | |
| 1 | Prosedur Pelayanan | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 | 276 | 17 | 68 | 346 | 3,15 |
| 2 | Kondisi bangunan pasar | 0 | 0 | 11 | 22 | 92 | 276 | 7 | 28 | 328 | 2,96 |
| 3 | Kejelasan Petugas Pelayanan | 0 | 0 | 7 | 14 | 91 | 273 | 12 | 48 | 335 | 3,05 |
| 4 | Kemampuan Petugas Pelayanan | 0 | 0 | 7 | 14 | 95 | 285 | 8 | 32 | 331 | 3,01 |
| 5 | Kebersihan lingkungan pasar | 0 | 0 | 12 | 24 | 91 | 273 | 7 | 28 | 325 | 2,95 |
| 6 | Kesopanan dan Keramahan Pelayan | 0 | 0 | 2 | 4 | 88 | 284 | 20 | 80 | 348 | 3,16 |
| 7 | Kewajaran Biaya Pelayanan | 0 | 0 | 8 | 16 | 89 | 267 | 13 | 52 | 335 | 3,05 |
| 8 | Kepastian Biaya Pelayanan | 0 | 0 | 1 | 2 | 79 | 237 | 30 | 120 | 359 | 3,26 |
| 9 | Kenyamanan Lingkungan | 0 | 0 | 5 | 10 | 101 | 303 | 4 | 16 | 329 | 2,99 |
| 10 | Keamanan Pelayanan | 0 | 0 | 4 | 8 | 91 | 273 | 15 | 60 | 341 | 3,10 |
| | | Jumlah NRR Terbagi/Unsur | | | | | | 3,068 | | | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | 76,70 | | | |
| | | Mutu Pelayanan | | | | | | B | | | |
| | | Kinerja Unit Pelayanan | | | | | | Balk | | | |

Rantau, 17 Oktober 2022
Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Tapin

H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M. IP
NIP. 19670622 200801 1 008

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan RPD Tahun 2024
Kabupaten Tegal

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Rugi/Benefit (Rp.) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan | Target Capaian | Rugi/Benefit (Rp.) |
|--|------------|---|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------|------------|---|---------|----------------|--------------------|
| | | | | | 7 | 8 | | | | | |
| PROGRAM PENZIMAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | | | | | | | |
| Pembentukan dan Pengelolaan Perusahaan, Pusat Perbelanjaan, dan Unit Usaha Toko Swalayan | Kab. Tegal | Percentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memiliki izin Usaha | 4 | 5 | 38.000.000 | 38.000.000 | Kab. Tegal | Percentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memiliki izin Usaha | % | 20 | 12 |
| Fasilitasi Penerimaan Komitmen Perulehan Penziman Pasar Bulog, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Penziman Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kab. Tegal | Jumlah Rekomendasi Penziman Komitmen Perulehan Pasar Elektronik dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Penziman Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | % | 100 | 38.000.000 | 38.000.000 | Kab. Tegal | Percentase Penziman Komitmen Perulehan Pasar Elektronik dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Penziman Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | % | 100 | 38.000.000 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Promosi Daging melalui Pameran Daging dan Wisata Daging di Produsen Ekspor Untuk Dalam yang terdiripat pph 1 (atu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Tegal | Rate-rata Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha yang dibina | % | 20 | 138.000.000 | 138.000.000 | Kab. Tegal | Rate-rata Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha yang dibina | % | 20 | 138.000.000 |
| Peningkatan Promosi Daging melalui Pameran Daging dan Wisata Daging di Produsen Ekspor Untuk Dalam yang terdiripat pph 1 (atu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Tegal | Percentase Pelaku Usaha lokal yang memiliki potensi di luar daerah (Calapan/Fembinaan pelaku usaha potensial) | % | 100 | 138.000.000 | 138.000.000 | Kab. Tegal | Cakupan/Pembinaan pelaku usaha potensial: | % | 100 | 138.000.000 |
| Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Produk Etape Utama yang dibina | Kab. Tegal | Percentase Pameran produk lokasi yang dilakukan | % | 100 | | | Kab. Tegal | Percentase Pameran produk lokasi potensial yang dilakukan: | % | 100 | |
| Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Produk Etape Utama yang dibina | Kab. Tegal | Percentase pelaku usaha potensial yang dibina | % | 100 | | | Kab. Tegal | Percentase jenis produk lokasi potensial yang dibina: | % | 100 | |
| Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Untuk Dalam Kabupaten/Kota | Kab. Tegal | Jumlah Pelaku Usaha Produk Etape Utama yang dibina | % | 25 | 30.400.000 | 30.400.000 | Kab. Tegal | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Untuk Dalam Kabupaten/Kota | % | 25 | 30.400.000 |
| Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Dalam Negeri | Kab. Tegal | Jumlah Pelaku Usaha yang Disabilitasi dalam Pameran Daging | % | 10 | 60.600.000 | 60.600.000 | Kab. Tegal | Jumlah Pelaku Usaha yang Disabilitasi dalam Pameran Daging: | % | 10 | 60.600.000 |
| Pameran Daging Lokal | Kab. Tegal | Jumlah Pelaku Usaha yang Disabilitasi dalam Pameran Daging Lokal | % | 15 | 47.000.000 | 47.000.000 | Kab. Tegal | Jumlah Pelaku Usaha yang Disabilitasi dalam Pameran Daging Lokal: | % | 15 | 47.000.000 |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | | | | | | | |
| Jumlah dan Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- | Kab. Tegal | Percentase jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- | % | 15,56 | 252.532.231 | 252.532.231 | Kab. Tegal | Jumlah dan Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- | % | 15,56 | 252.532.231 |
| Jumlah Pelaku Usaha Produk Dalam Negeri di Daerah | Kab. Tegal | Percentase jumlah Pelaku Usaha Produk Dalam Negeri di Daerah | % | 20 | | | Kab. Tegal | Percentase jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- | % | 20 | |
| Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Kab. Tegal | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- | % | 65 | 252.532.231 | 252.532.231 | Kab. Tegal | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | % | 65 | 252.532.231 |
| Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Kab. Tegal | Percentase jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- | % | 70 | | | Kab. Tegal | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | % | 70 | |
| Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Kab. Tegal | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- | % | 100 | 252.532.231 | 252.532.231 | Kab. Tegal | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | % | 100 | 252.532.231 |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | |
| Indeks Kapasitas Masyarakat (Indeks) terhadap Karyawannya | Kab. Tegal | Percentase pengguna pasar yang memenuhi kriteria lemah... | % | 78 | 4.020.000.000 | 4.020.000.000 | Kab. Tegal | Indeks Kapasitas Masyarakat (Indeks) terhadap Karyawannya | % | 78 | 4.020.000.000 |
| Percentase pengguna pasar yang memenuhi kriteria lemah... | Kab. Tegal | Percentase pemenuhan ketidakpuasan pelanggan | % | 85 | | | Kab. Tegal | Percentase pengguna pasar yang memenuhi kriteria lemah... | % | 85 | |
| Percentase pengguna pasar yang memenuhi kriteria lemah... | Kab. Tegal | Percentase pengguna pasar yang memenuhi kriteria lemah... | % | 100 | | | Kab. Tegal | Percentase pengguna pasar yang memenuhi kriteria lemah... | % | 100 | |
| Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Tegal | Percentase Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki | % | 100 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | Kab. Tegal | Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | % | 100 | 4.000.000.000 |
| Jumlah Pelaku Usaha Penyalur dan Penetrasi | Kab. Tegal | Jumlah Pelaku Usaha Penyalur dan Penetrasi | % | 1.800 | 50.000.000 | 50.000.000 | Kab. Tegal | Jumlah Pelaku Usaha Penyalur dan Penetrasi | % | 1.800 | 50.000.000 |
| Jumlah Pelaksanaan Keterlibatan di Wilayah Perkuat | Kab. Tegal | Jumlah Pelaksanaan Keterlibatan di Wilayah Perkuat | % | 1.100 | | | Kab. Tegal | Jumlah Pelaksanaan Keterlibatan di Wilayah Perkuat | % | 1.100 | |
| Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Tegal | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 1 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | Kab. Tegal | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 1 | 2.200.000.000 |
| Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Tegal | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi | Unit | 15 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | Kab. Tegal | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi | Unit | 15 | 1.800.000.000 |
| Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Tegal | Percentase Data Penyeusa Toko/Kios / Warung | % | 100 | 50.000.000 | 50.000.000 | Kab. Tegal | Percentase Data Penyeusa Toko/Kios / Warung | % | 100 | 50.000.000 |
| Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Kab. Tegal | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi | 4 | 50.000.000 | | | Kab. Tegal | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi | 4 | 50.000.000 | |
| Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Tegal | Kedua-dua varisi barang bersifat kebutuhan pokok | % | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | Kab. Tegal | Kedua-dua varisi barang bersifat kebutuhan pokok | % | 1 | 50.000.000 |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN DINDI DAN BANTING FETING | | | | | | | | | | | |
| Pengawas Pupuk dan Petiobid Berstandari di Tegal Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Tegal | Percentase Pembiayaan Pupuk dan Petiobid yang tepat waktu, target jumlah dan target sesuai | % | 100 | 14.999.952 | 14.999.952 | Kab. Tegal | Percentase Pembiayaan Pupuk dan Petiobid yang tepat waktu, target jumlah dan target sesuai | % | 100 | 14.999.952 |
| Pengawas Benih dan Petiobid Berstandari | Kab. Tegal | Jumlah Laporan Pengawas Benih dan Petiobid dan Realisasi Minimal 50% | Laporan | 4 | 14.999.952 | 14.999.952 | Kab. Tegal | Jumlah Laporan Pengawas Benih dan Petiobid dan Realisasi Minimal 50% | Laporan | 4 | 14.999.952 |

| Rencangan Awal RRD | | | | | | | Hasil Kebutuhan Akhir | | | | | | |
|--------------------|---|------------|--|---------|----------------|----------------------|---|------------|---|-------------|----------------|----------------------|----|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Kelahiran Kinea | Satuan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinea | Satuan | Tujuan Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pock dan Barang Penting di Tingkat Paser Kabupaten/Kota | 2 | Pembentukan Laporan Harga Beriring Kebutuhan Pock dan Barang Penting | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pembentukan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pock dan Barang Penting di Tingkat Paser Kabupaten/Kota | Kab. Tepin | Jumlah Laporan Pengendalian Stock atau Penting di Tingkat Ago dan Pesa Balayet | Laporan | 48 | 20.027.248 | Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pock dan Barang Penting di Tingkat Paser Raya | Kab. Tepin | Jumlah Laporan Pengendalian Stock atau Keseimbangan Barang Kebutuhan Pock dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pesa Rayat | % | 100 | 35.000.048 | |
| | Pembentukan Operasi Pasar Raya yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan berdasarkan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kab. Tepin | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Regular dan Pasar Khusus yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Laporan | 4 | 14.972.600 | Pelaksanaan Operasi Pasar Raya yang Terintegrasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kab. Tepin | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Regular dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 48 | 20.027.248 | |
| | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | 14.972.600 | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal Uji/Ura dan Pengawasannya | Kab. Tepin | Pelaksanaan Metrologi Legal Uji/Ura yang Berdampak terhadap UTTP yaitu di awali | % | 100 | 159.058.400 | Pelaksanaan Metrologi Legal Uji/Ura yang Berdampak terhadap UTTP yang memenuhi ketentuan berlaku Terhadap UTTP yang diawali | Kab. Tepin | Persentase satuan ukuran yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | % | 70 | 139.058.400 | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal Uji/Ura, Tera Uji/Ura dan Pengawasannya | Kab. Tepin | Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP yaitu di awali | % | 100 | 159.058.400 | Pelaksanaan Metrologi Legal Uji/Ura, Tera Uji/Ura dan Pengawasannya | Kab. Tepin | Persentase pelaku usaha bidang metrologi legal yang memenuhi ketentuan berlaku Terhadap UTTP yang diawali | % | 100 | 139.058.400 | |
| | PROGRAM PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DABAH KABUPATEN / KOTA | | | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DABAH KABUPATEN / KOTA | | | | | | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Beura Tera, Tera Uji/Ura dan Pengawasannya/Penyalahgunaan Metrologi Legal | Kab. Tepin | Jumlah Alat Uji, Alat Taker, Alat Timbang dan Alat Pengukur Selaku Diterapkan Diterapkan | Unit | 400 | 20 | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Uji/Ura dan Pengawasannya/Penyalahgunaan Metrologi Legal | Kab. Tepin | Jumlah BDT maklumat dan informasi yang diberikan | Unit | 400 | 20 | |
| | Rekomendasi dan Evaluasi Kinea dan Tingkatnya | Kab. Tepin | Jumlah Regulasi / Instrumen teknis UTTP dan BDT yang ditetapkan | Unit | 400 | 20 | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Uji/Ura dan Pengawasannya/Penyalahgunaan Metrologi Legal | Kab. Tepin | Jumlah BDT maklumat dan informasi yang diberikan | Unit | 400 | 20 | |
| | Rekomendasi dan Evaluasi Kinea dan Tingkatnya | Kab. Tepin | Jumlah BDT maklumat dan informasi yang diberikan | Unit | 400 | 20 | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Uji/Ura dan Pengawasannya/Penyalahgunaan Metrologi Legal | Kab. Tepin | Jumlah BDT maklumat dan informasi yang diberikan | Unit | 400 | 20 | |
| | Rekomendasi dan Evaluasi Kinea dan Tingkatnya | Kab. Tepin | Jumlah BDT maklumat dan informasi yang diberikan | Unit | 400 | 20 | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Uji/Ura dan Pengawasannya/Penyalahgunaan Metrologi Legal | Kab. Tepin | Jumlah BDT maklumat dan informasi yang diberikan | Unit | 400 | 20 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinea dan Iktiar Realensi Kinea SP2D | Kab. Tepin | Jumlah Rekomendasi dan Evaluasi Kinea dan Tingkatnya | Dokumen | 10 | 8.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinea dan Iktiar Realensi Kinea SP2D | Kab. Tepin | Jumlah Rekomendasi dan Evaluasi Kinea dan Tingkatnya | Dokumen | 10 | 8.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SP2D | Kab. Tepin | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secepat mungkin | Dokumen | 1 | 3.900.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SP2D | Kab. Tepin | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secepat mungkin | Laporan | 1 | 3.900.000 | |
| | Bulan/Triwulan/Semesteran SP2D | Kab. Tepin | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala | Laporan | 3 | 6.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SP2D | Kab. Tepin | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala | Laporan | 3 | 6.000.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indeks Kapasitas Pagawai terhadap tugas pokok | IRW | 81 | 563.360.700 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indeks Kapasitas Pagawai terhadap tugas pokok | IRW | 81 | 563.360.700 | |
| | Pembentukan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Tepin | Persentase Gaji yang Mengalami Kenaikan | % | 100 | 3.042.666.997 | Pembentukan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Tepin | Jumlah Orang yang Mengalami Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 360 | 3.042.666.997 | |
| | Pembentukan Komponen Instansi Lainnya/Pemerintahan Baganian Kantor | Kab. Tepin | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala | Laporan | 1 | 3.900.000 | Pembentukan Komponen Instansi Lainnya/Pemerintahan Baganian Kantor | Kab. Tepin | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala | Laporan | 1 | 3.900.000 | |
| | Penyediaan Perjalanan dan Pengembangan Kantor | Kab. Tepin | Jumlah Paket Perjalanan dan Pengembangan Kantor | Paket | 5 | 67.690.200 | Penyediaan Perjalanan dan Pengembangan Kantor | Kab. Tepin | Jumlah Paket Perjalanan dan Pengembangan Kantor | Paket | 5 | 67.690.200 | |
| | Penyediaan Perjalanan Rumah Tangga | Kab. Tepin | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didistribusikan | Paket | 13 | 1.000.000 | Penyediaan Perjalanan Rumah Tangga | Kab. Tepin | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didistribusikan | Paket | 13 | 1.000.000 | |
| | Penyediaan Sajian Cigatak Kantor | Kab. Tepin | Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Pengembangan | Paket | 12 | 91.052.200 | Penyediaan Sajian Cigatak Kantor | Kab. Tepin | Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Pengembangan | Paket | 12 | 91.052.200 | |
| | Penyediaan Bantuan Material yang Didistribusikan | Kab. Tepin | Jumlah Paket Bahan/Material yang Didistribusikan | Paket | 2 | 21.724.800 | Penyediaan Bantuan Material yang Didistribusikan | Kab. Tepin | Jumlah Paket Bahan/Material yang Didistribusikan | Paket | 2 | 21.724.800 | |

| Rencangan Areal RPJPD | | | | | | Hasil Kebutuhan Awal | | | | | | |
|--|--------------|--|---------|----------------|----------------------|--|---|---|--|----------------|----------------------|---------------|
| Program / Kegiatan/Dikti Kegiatan | Lokasi | Keluaran Kinerja | Satuan | Target Capaian | Bdg. Indikatif (Bd.) | Program / Kegiatan/Dikti Kegiatan | Lokasi | Keluaran Kinerja | Satuan | Target Capaian | Bdg. Indikatif (Bd.) | |
| 1 Penyelidikan Bahan/Material | 2 Kab. Tapan | Jumlah Paket Fasilitasi Kunjungan Temu | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Facilitasi Kunjungan Temu | Kab. Tapan | Jumlah Paket Fasilitasi Kunjungan Temu | Paket | Paket | 12 | 3.128.800 | Penyelidikan Bahan/Material | Kab. Tapan | Jumlah Paket Fasilitasi Kunjungan Temu | Paket | 12 | 3.128.800 |
| Penyeleksi@Bantuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Tapan | Jumlah Paket Penilaian Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | Paket | 2 | 1.000.000 | Facilitasi Kunjungan Temu | Kab. Tapan | Jumlah Paket Penilaian Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 |
| Penyeleksi@Bantuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Tapan | Jumlah Laporan Penyeleksi@Bantuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD | Laporan | Laporan | 350 | 300.000.000 | Penyeleksi@Bantuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Tapan | Jumlah Laporan Penyeleksi@Bantuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 350 | 300.000.000 |
| Penyeleksi@Bantuan Milik Daerah Penyelidikan Usulan Pemerintah Daerah | Kab. Tapan | Jumlah Paket Bantuan Milik Daerah dalam Kondisi Baik, Pada Unit Perakitan dan Mesin Laundry yang Didistribusikan | % | 100 | 80.000.000 | Penyeleksi@Bantuan Milik Daerah Penyelidikan Usulan Pemerintah Daerah | Kab. Tapan | Jumlah Paket Bantuan Milik Daerah Penyelidikan Usulan Pemerintah Daerah | % | 100 | 80.000.000 | |
| Penyeleksi@Bantuan dan Mesin Laundry | Kab. Tapan | Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Laundry yang Didistribusikan | Unit | 5 | 70.000.000 | Penyeleksi@Bantuan dan Mesin Laundry | Kab. Tapan | Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Laundry yang Didistribusikan | Unit | 5 | 70.000.000 | |
| Penyeleksi@Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bengalon Laundry | Kab. Tapan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bengalon Laundry | Unit | 5 | 15.000.000 | Penyeleksi@Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bengalon Laundry | Kab. Tapan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bengalon Laundry | Unit | 5 | 15.000.000 | |
| Penyeleksi@Jasa Penyelidikan Usulan Pemerintah Daerah | Kab. Tapan | Jumlah Laporan Penyeleksi@Jasa Penyelidikan Usulan Pemerintah Daerah | IMI | IMI | 355.156.000 | Penyeleksi@Jasa Penyelidikan Usulan Pemerintah Daerah | Kab. Tapan | Jumlah Laporan Penyeleksi@Jasa Penyelidikan Usulan Pemerintah Daerah | IMI | 355.156.000 | | |
| Penyeleksi@Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Tapan | Jumlah Laporan Penyeleksi@Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disertifikasi | Laporan | Laporan | 12 | 136.456.000 | Penyeleksi@Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Tapan | Jumlah Laporan Penyeleksi@Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disertifikasi | Laporan | 12 | 136.456.000 |
| Penyeleksi@Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Tapan | Jumlah Laporan Penyeleksi@Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disertifikasi | Laporan | Laporan | 12 | 222.700.000 | Penyeleksi@Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Tapan | Jumlah Laporan Penyeleksi@Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disertifikasi | Laporan | 12 | 222.700.000 |
| Penyeleksi@Bantuan Milik Daerah Penyelidikan Pemerintah Daerah | Kab. Tapan | Jumlah Paket Bantuan Milik Daerah dalam Kondisi Baik | % | 100 | 154.838.000 | Penyeleksi@Bantuan Milik Daerah Penyelidikan Pemerintah Daerah | Kab. Tapan | Jumlah Paket Bantuan Milik Daerah dalam Kondisi Baik | % | 100 | 154.838.000 | |
| Penyeleksi@Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dires Jabatan | Kab. Tapan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dires dan Objektan yang Dipilihkan | Unit | 20 | 86.978.000 | Penyeleksi@Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dires Jabatan | Kab. Tapan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dires dan Objektan yang Dipilihkan | Unit | 20 | 86.978.000 | |
| Penyeleksi@Peralatan dan Mesin Laundry | Kab. Tapan | Jumlah Peralatan dan Mesin Laundry yang Dipilihkan | Unit | 20 | 19.850.000 | Penyeleksi@Peralatan dan Mesin Laundry | Kab. Tapan | Jumlah Peralatan dan Mesin Laundry yang Dipilihkan | Unit | 20 | 19.850.000 | |
| Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kab. Tapan | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipilihkan | Unit | 3 | 6.000.000 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kab. Tapan | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipilihkan | Unit | 3 | 6.000.000 | |
| Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Tapan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Laundry yang Dipilihkan/Direhabilitasi | Unit | 3 | 40.000.000 | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Tapan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Laundry yang Dipilihkan/Direhabilitasi | Unit | 3 | 40.000.000 | |
| | | TOTAL | | | 8.480.412.918 | | | | | | TOTAL | 8.480.412.918 |

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA SKPD DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024
KABUPATEN TAPIN

Tabel 4.1.

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/ Program / Kegiatan /Sub Kegiatan | Satuan Devisa | Satuan Perangkat Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | | Pagu Indikatif Mencantumkan Sumber Dana Tahun 2024 (Rp) | | | Prakiraan Maju Tahun 2025 |
|------|---|---------------|--|------------|--|--|---------------|---|------|------------------------|---------------------------|
| | | | | | Tarik.Ukur | Target | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Target Capaian Kinerja | |
| 1 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 62.638.500 | | 9 | 60% 68.302.450 |
| | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perilahan Peritinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kab. Tapin | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perilahan Peritinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kab. Tapin | 400 Dokumen | 45.028.600 | | | | 425 Dokumen | 49.531.450 |
| | Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Elektronik yang terdapat pada 1. (satu) Dinas/Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 19.371.000 |
| | PROGRAM PENGEREMBANGAN EKSPOR Penyelenggaraan Promosi Diagang melalui Pameran Diagang dan Misi Diagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1. (satu) Dinas/Kabupaten/Kota | | | | Rate-rata Pertumbuhan Penjualan Pelaku Usaha yang diiona | 20 % | 113.568.616 | | | | 20% 124.925.478 |
| | | | | | Persentase Pelaku Usaha lokal yang memiliki pasar di luar daerah | 15 % | | | | | 18% |
| | | | | | Cakupan Pembinaan pelaku usaha potensial | 100 % | 113.568.616 | | | | 100% 124.925.478 |
| | | | | | Persentase Pameran produk lokal yang diikuti | 100 % | | | | | 100% |
| | | | | | Persentase jenis Produk Lokal (potensial) yang dipromosikan | 100 % | | | | | 100% |
| | | | | | Persentase pelaku usaha potensial yang dipromosikan | 100 % | | | | | 100% |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 10 Pelaku Usaha | 64.483.148 | | | 10 Pelaku Usaha | 70.931.463 |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | 15 Pelaku Usaha | 49.085.468 | | | 15 Pelaku Usaha | 53.934.015 |
| | | | | | Jumlah Undian Jumlah Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif | 15,56 % | 489.726.050 | | | | 17,31% 518.260.855 |
| | | | | | Pertumbuhan jenis Produk Lokal yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Daerah | | | | | | 22,50% |
| | | | | | Cakupan Wilayah Pembinaan Sistem Resi Gudang | 85 % | 489.728.050 | | | | 85% 538.260.855 |
| | | | | | Persentase pelaku usaha produksi lokal yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 70 % | | | | | 70% |
| | | | | | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 100 UMKM | 489.728.050 | | | 100 UMKM | 538.260.855 |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) Terhadap Kenyamanan Pasar | 78 IKM | 6.637.208.883 | | | 79 IKM | 7.300.929.771 |
| | | | | | Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak | 85 % | | | | | 86% |
| | | | | | Persentase penerimaan vertikalitas/citar | 100 % | | | | | 100% |
| | | | | | Persentase Sarana dan prasarana yang dibangun/Digembalik | | 6.323.852.483 | | | | 6.955.248.731 |
| | | | | | Jumlah Pelaksanaan Penetapan dan Penertiban Pedagang di Wilayah Pasar | 1800 Orang/Kali | | | | 2000 Orang/Kali | |
| | | | | | Jumlah Pelaksanaan Kebersihan di Wilayah Pasar | 1.100 Orang/Kali | | | | 1.120 Orang/Kali | |
| | | | | | Kab. Tapin | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | 3.390.068.103 | | 5 Unit | 3.619.075.133 |
| | | | | | Kab. Tapin | Jumlah Fasilitasi Pengolahan Sarana Distribusi Perdagangan | 15 Unit | 3.033.794.180 | | 16 Unit | 3.337.173.598 |
| | | | | | | Jumlah Data Penyewaan Toko/Kios/Caf/Warung | 100 % | 313.346.400 | | | 100% 344.681.040 |
| | | | | | Kab. Tapin | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pergelola Sarana Distribusi Perdagangan | 4 Dokumen | 313.346.400 | | | 344.681.040 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan / Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan | Sasaran Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2024 (Rp) | | Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2025 (Rp) | |
|------|---|----------------|--------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--|-----------|--|--------------------|
| | | | | | Tolak Ukur | Target | APBD Kab | APBN Prov | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikator(Rp) |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | Kedekisan variasi harga barang kebutuhan pokok | 1 % | 3.075.502.000 | | | 1% | 3.383.052.200 |
| | Distribuer Laruputan dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah | | | Perseentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat jumlah dan tetap Sasaran | 100 % | 60.543.200 | | | 100% | 66.597.520 |
| | Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | Kab. Tapin Jumlah Laporan Penggunaan Pestisida dengan Releksi Minimal 90%. | 4 Laporan | 60.543.200 | | | 4 Laporan | 66.597.520 |
| | Pengendalian Harga, dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Banting, Penitig di Tingkat Basar Kabupaten/Kota | | | Perseentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 100 % | 3.014.958.800 | | | 100% | 3.316.454.680 |
| | Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Banting pada Pasar Rakyat Yogyakarta | | | Kab. Tapin Jumlah Laporan Penggerdian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 48 Laporan | 375.717.900 | | | 48 Laporan | 413.289.690 |
| | Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | Kab. Tapin Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 2.639.240.900 | | | 4 Laporan | 2.903.154.990 |
| | Pelaisaranan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | Perseentase alat ukur timbangan dan per lengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan | 70 % | 367.430.930 | | | 70% | 404.174.023 |
| | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | Perseentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP yang di awasi | 100 % | 367.430.930 | | | 100% | 404.174.023 |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | Perseentase alat ukur, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera | 100 % | 367.430.930 | | | 100% | 404.174.023 |
| | | | | Jumlah BDCT makanan dan minuman yang diawasi | 400 Unit | | | | 450 Unit | |
| | | | | Jumlah kegiatan/ konten edukasi UTTP dan BDCT serta Satuan Ukuran yang dilaksanakan/ diposting | 20 Postingen | | | | 25 Postingen | |
| | | | | Jumlah UTTP yang diawasi | 900 Sampel | | | | 900 Sampel | |
| | | | | Perseentase Tindak Lanjut Hasil pengawasan UTTP | 100 % | | | | 100% | |
| | | | | | | | | | | |
| | Kab. Tapin Jumlah Alat Ukur, Alat Teka, Alat Timbang, dan Alat Perilengkapan Ditera Ulang | | | Kab. Tapin Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 900 Unit | 326.406.630 | | | 950 Unit | 359.047.293 |
| | | | | Rata-rata capaian kinerja lembaga sekretariat | 100 % | 7.734.722.394 | | | 100% | 45.126.730 |
| | | | | Perseentase efisiensi penyelesaian arsipiran | 100 % | | | | 100% | |
| | | | | Perseentase ASN dengan capaian kinerja >90% | 100 % | | | | 100% | 6.508.194.633 |
| | | | | Perseentase ujian program, kiegatan, sub kiegatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen persencanahan | 100 % | 9.900.400 | | | 100% | 10.890.440 |
| | | | | Perseentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja Bappeltibang yang tepat waktu | 100 % | | | | 100% | |
| | | | | Perseentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | 100 % | | | | 100% | |
| | Koordinasi dan Perpusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktizarr Realitas Kinerja SKPD | | | Kab. Tapin Jumlah Rekomendasi Pemerintah Komitmen Percelean, Peritinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelaporan Peritinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 10 Dokumen | 9.900.400 | | | 10 Dokumen | 10.890.440 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | Perkentase Sumur Pertambangan/tawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan kesangan | 100 % | 4.626.264.589 | | | 100% | 5.088.891.048 |
| | | | | Perseentase laporan kerugian yang diampaikan topat waktu dan sesuai standar | 100 % | | | | 100% | |
| | | | | perseentase hasil temuan pemeriksaan yang | 100 % | | | | 100% | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan | Satuan Daerah | Satuan Perangkat Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | | Pagu Indikator Mewujud Sumber Dana Tahun 2024 (Rp) | | | Prakiraan Maju Tahun 2025 |
|------|---|---------------|-------------------------|--|--|---------------|---------------|--|------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | Tolak Ukar | Target | APBD Kab Prov | APBN | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikator(Rp) | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Kab. Tapin | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 360 | 4.615.427.389 | | 12 Bulan | 5.076.970.128 | |
| | Koordinasi dan Penyeusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Kab. Tapin | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 4.709.200 | | | 1 Dokumen | 5.180.120 | |
| | Koordinasi dan Penyeusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | Kab. Tapin | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 3 laporan | 6.128.000 | | | 3 Dokumen | 6.740.800 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat | 81 (KM) | 1.515.216.800 | | 82 (KM) | 1.666.738.480 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Kab. Tapin | Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN | 100 % | | | | | 100% | |
| | Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor | | Kab. Tapin | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Disediakan | 2 Paket | 19.509.200 | | | 12 Bulan | 21.460.120 | |
| | Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga | | Kab. Tapin | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 164.498.400 | | | 12 Bulan | 180.948.240 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Kab. Tapin | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 13 Paket | 3.192.500 | | | 12 Bulan | 3.511.750 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Kab. Tapin | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 125.725.600 | | | 12 Bulan | 138.298.160 | |
| | Penyediaan Bahan/Fasilitas | | Kab. Tapin | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 40.818.800 | | | 12 Bulan | 44.900.680 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Kab. Tapin | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Paket | 10.272.300 | | | 12 Bulan | 11.299.530 | |
| | Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Kab. Tapin | Jumlah Paket Fasilitasi/Kunjungan Tamu | 2 Paket | 3.000.000 | | | 12 Bulan | 3.300.000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Kab. Tapin | Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 350 Laporan | 1.148.200.000 | | | 12 Bulan | 1.263.020.000 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Kab. Tapin | Jumlah Paket Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | 100 % | 236.807.900 | | | 12 Bulan | 260.488.690 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Kab. Tapin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 182.528.000 | | | 25 Unit | 200.780.800 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Kab. Tapin | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 54.279.900 | | | 15 Unit | 59.707.890 | |
| | Pengadaan Isla Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Kab. Tapin | Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat | 81 (KM) | 412.168.450 | | | 82 (KM) | 453.385.295 | |
| | Pengadaan Isla Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Kab. Tapin | Jumlah Laporan Penyejaian Isla Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 151.895.204 | | | 12 Bulan | 167.084.724 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Kab. Tapin | Jumlah Laporan Penyejaian Isla Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 260.273.246 | | | 12 Bulan | 286.300.571 | |
| | Pemeliharaan Isla Pendidikan | | Kab. Tapin | Jumlah Laporan Penyejaian Isla Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 934.364.255 | | | 12 Bulan | 1.027.800.681 | |
| | Pemeliharaan Isla Pendidikan | | Kab. Tapin | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 20 Unit | 200.181.175 | | | 12 Bulan | 220.199.293 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Kab. Tapin | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 38.570.080 | | | 12 Bulan | 42.427.088 | |
| | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | Kab. Tapin | Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara | 3 Unit | 15.930.500 | | | 12 Bulan | 17.523.550 | |
| | Pemeliharaan/Rerabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Kab. Tapin | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rerabilitasi | 3 Unit | 679.682.500 | | | 12 Bulan | 747.650.750 | |
| | | | | | | | | | | Total | 18.380.398.473 |

Ranta U,
Kepala Dinas
Perdagangan Kab. Bima
PERDAGANGAN
H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M
NIP.19670622 200801 1 008

H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M.I.P
NIP.19670622 200801 1 008